

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu Negara sangat tergantung pada lembaga keuangannya. Lembaga keuangan terutama perbankan syariah yang merupakan tulang punggung dalam penggerak roda-roda perekonomian terutama di sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank berperan penting dalam penghimpun dan penyalur dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, serta masyarakat dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional supaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Perbankan syariah berfungsi dan juga berperan penting di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sebagai stabilisator moneter bank syariah ikut serta dalam menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, ataupun kebijakan diskonto.

Sebagai dinamisator perekonomian yaitu bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan baik nasional maupun internasional. Dalam sistem keuangan, bank juga mempunyai peranan penting yaitu dalam mengalihkan asset atau dana dari yang kelebihan dana ke yang membutuhkan dana, memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk

melakukan transaksi barang dan jasa, menawarkan produk dana dengan berbagai alternatif tingkat likuiditas, serta memungkinkan pertemuan *unit surplus* dengan *unit deficit* secara tidak langsung.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak buruk bagi dunia perbankan di Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi saat itu membuat sektor perbankan terpuruk dan memaksa pemerintah untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk menjalankan usahanya. Demikian pula krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 membawa dampak buruk pada sektor perbankan yaitu berimbas pada penurunan ekspansi pembiayaan perbankan.

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, salah satu sektor perekonomian yang masih dapat bertahan adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki keunggulan komparatif dan perlu terus dikembangkan. Menurut *Outlook Perbankan Syariah 2013*, sektor UMKM telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dimana yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, dari sudut

perekonomian nasional sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu.

Menurut UU No 10 Tahun 1998. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang cocok dalam membangun dan mengembangkan UMKM.¹ Fokus utama usaha BPRS pada pembentukan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan modal untuk usaha, bukan kredit konsumtif. Tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan (pemodalan), resiko usaha ditanggung bersama. Bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (*partnership*) dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko. Kelebihan BPRS dibandingkan dengan bank umum adalah BPRS mempunyai sifat yang cenderung lebih aktif memasarkan produknya di pasar tradisional atau di kampung. Prioritas utama pelayanan jasa keuangan BPRS adalah individu dan pengusaha kecil dengan pangsa pasar menengah ke bawah dan pedesaan. Dengan keberadaan usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian, maka peranan BPRS menjadi sangat strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga BPRS menjadi salah satu pilar penting dalam aktivitas perekonomian nasional.

Berdasarkan pengamatan Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia Per 2013.² Tercatat sudah sebanyak 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor sebanyak 402 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan BPRS dari waktu ke waktu

¹ www.bi.go.id, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998, tentang Perbankan"

² www.ojk.go.id "Statistik Perbankan Syariah tentang Jaringan Kantor Perbankan Syariah", "Statistik Perbankan Indonesia tentang Kegiatan Usaha Perbankan".

sangat menggembirakan adapun dari sisi asset keseluruhan BPRS tercatat memiliki total asset sebesar 2,5 triliun atau sekitar 3 persen dari total asset perbankan nasional. Akan tetapi dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional yang semakin berkurang dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1635 tetapi angka tersebut BPRS masih tertinggal jauh dari segi industri, dan juga dilihat dari sisi realitas kehidupan masyarakat masih tertinggal, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya, maka tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Optimalisasi potensi umat harus terus menerus dilakukan yang diantaranya adalah melalui pengembangan industry BPRS. Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor BPR Syariah dan BPR Konvensional di Indonesia selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

	BPR SYARIAH			BPR KONVENSIONAL		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Jumlah Bank	155	158	163	1669	1653	1635
Jumlah Kantor	364	401	402	4172	4425	4678

Sumber : Diolah Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia 2013

Meningkatnya jumlah BPRS yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), meningkatnya jumlah BPRS juga

berpengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada BPRS.³ Bila dibandingkan dengan yang terjadi pada industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia, BPR Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya yang mencapai 25%. Jika membandingkan antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah, BPR Konvensional merupakan bagian dari sistem perbankan yang mempunyai andil yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan BPR konvensional di Indonesia menunjukkan indikasi yang menggembirakan, ditunjukkan dari perkembangannya baik dari penyaluran kredit, sumber dana dan asset.

Gambar 1.1



Sumber : Diolah Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia 2013

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dimana mempunyai peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu tugasnya adalah menyalurkan pembiayaan untuk membantu percepatan perkembangan sektor riil. Hal ini memberikan harapan

³ Suryani. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol 19, (No.1). Mei 2011.

besarnya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk pembiayaan sektor riil. Kebijakan penyaluran dana sendiri untuk kegiatan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank antara lain berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan perusahaan perbankan seperti jumlah kredit macet (NPF), kecukupan modal bank (CAR), laba yang diperoleh (ROA), batas aman pemberian pembiayaan (FDR). Sedangkan faktor eksternal bank berkaitan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi.

Hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan ditunjukkan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah penyaluran dana yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank⁴. Efektifitas sebuah bank sendiri dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Loan to Deposit Ratio* (pada bank konvensional) atau nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut.

FDR dapat menjadi indikator utama dalam menilai fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi penyaluran dana menggunakan DPK, maka fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik. Sebaliknya, rendahnya penyaluran dana menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan lancar, karena DPK tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk kepentingan lain. FDR juga menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan penilaian kesehatan

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, cet. Ke 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 271

terhadap Bank-Bank Syariah di Indonesia berdasarkan beberapa aspek likuiditas dan FDR merupakan salah satu indikatornya.

Meskipun penyaluran pembiayaan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu Negara, namun dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dapat tersalurkan kembali dengan baik dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat seringkali mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Sejalan dengan semakin kompleksnya produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maka semakin kompleks pula resiko yang akan ditimbulkan. Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yang menjadi perhatian utama bank dimana terdapat kemungkinan akan adanya resiko gagal bayar atau yang disebut *Non Performing Financing* (NPF). NPF ini menunjukkan kemampuan kolektibilitas bank dalam mengumpulkn kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank sampai terkumpul sepenuhnya. NPF merupakan presentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tidak kompeten dalam mengelola kreditnya serta mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi. Tinggi rendahnya NPF dapat mempengaruhi kebijakan Bank dalam menyalurkan kreditnya sehingga nantinya akan mempengaruhi FDR.

Dalam kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, modal juga merupakan suatu faktor yang penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Modal bank juga dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko yang timbul dari pembiayaan itu sendiri. Untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi maka harus menyediakan penyediaan modal minimum. Fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyediakan dana dan untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank.

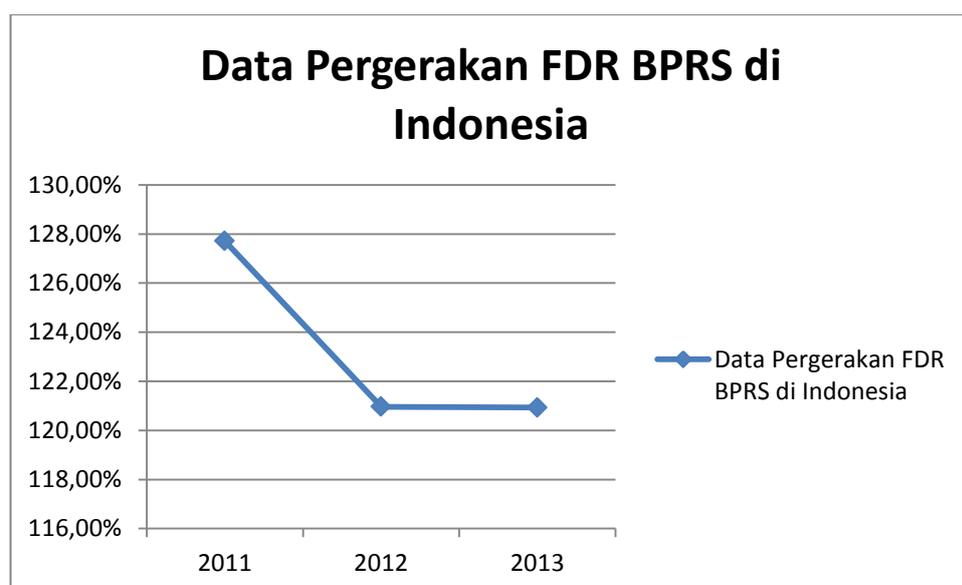
Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko dalam pembiayaan yang disalurkan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak, sejalan dengan pembiayaan yang meningkat maka akan meningkatkan FDR itu sendiri. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara Internasional berdasarkan Standar *Bank for International Settlement* (BIS).

Dalam menjalankan usahanya, Bank Pembiayaan Syariah harus memperhatikan aspek profitabilitas. Profitabilitas merupakan tolak ukur untuk

mengetahui laba yang dihasilkan oleh bank. Besar kecilnya laba yang dihasilkan oleh bank sangat dipengaruhi oleh kinerja bank dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank yang mampu menghasilkan laba tinggi berarti bank tersebut dapat menjalankan usahanya secara efisien. Profitabilitas disini dihitung menggunakan Rasio ROA (*Return On Asset*) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan assets yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memperoleh laba atau keuntungan yang tinggi dan sebaliknya nilai ROA yang rendah mengindikasikan bahwa bank memperoleh laba atau keuntungan yang rendah. Tinggi rendahnya ROA yang dihasilkan oleh Bank akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah penyaluran pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Syariah, sejalan dengan meningkatnya pembiayaan maka akan meningkatkan FDR itu sendiri.

Bila dilihat dari data statistik perbankan syariah tahun 2011-2013,

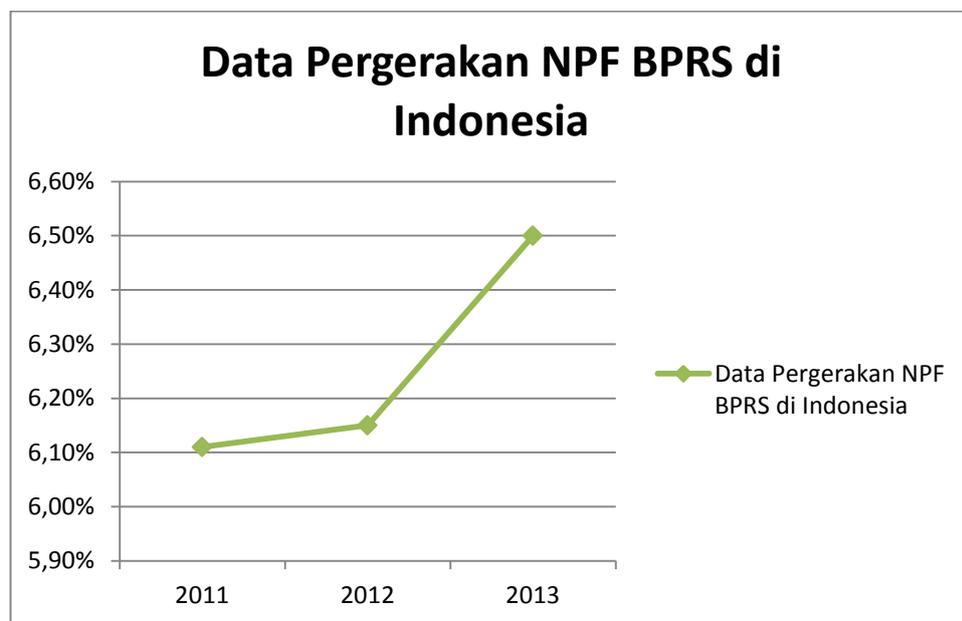
Gambar 1.2



Sumber: Diolah, Statistik perbankan syariah 2011-2013

Berdasarkan data di atas pada tahun 2011-2013 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia rata-rata mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 mencapai 6,75%, dan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan mencapai 0,03%. Hal ini disebabkan bahwa upaya ekspansi pembiayaan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode tersebut belum berhasil mengangkat angka FDR yang signifikan.

Gambar 1.3



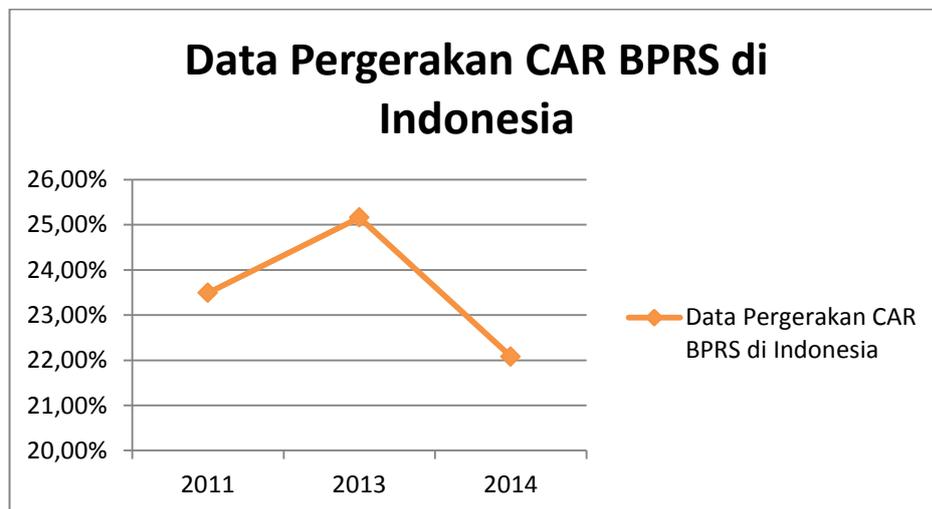
Sumber: Diolah, Statistik perbankan syariah 2011-2013

Terlihat pada tabel di atas bahwa NPF pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 6,11% menjadi 6,15% dan tidak searah dengan FDR yang mengalami penurunan sebesar 127,71% menjadi 120,96%, pada tahun 2012-2013 NPF dan FDR juga tidak searah dimana NPF mengalami peningkatan sebesar

6,15% menjadi 6,50% sedangkan FDR mengalami penurunan sebesar 120,96% menjadi 120,93%.

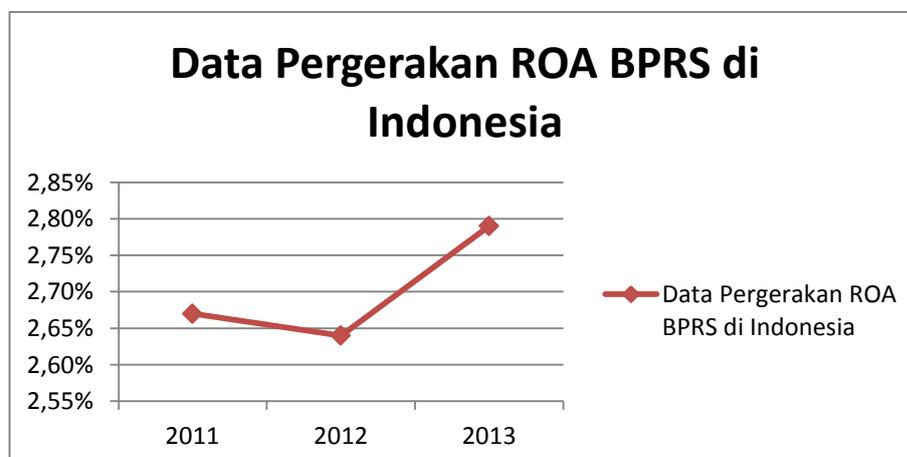
Berdasarkan data dibawah, CAR pada tahun 2011-2012 menunjukkan peningkatan sebesar 23,49% menjadi 25,16% tidak searah dengan FDR yang mengalami penurunan sebesar 127,71% menjadi 120,96%, CAR pada tahun 2012-2013 juga mengalami penurunan sebesar 25,16% menjadi 22,08% kali ini searah dengan FDR yang juga mengalami penurunan sebesar 120,96% menjadi 120,93%.

Gambar 1.4



Sumber: Diolah, Statistik perbankan syariah 2011-2013

Gambar 1.5



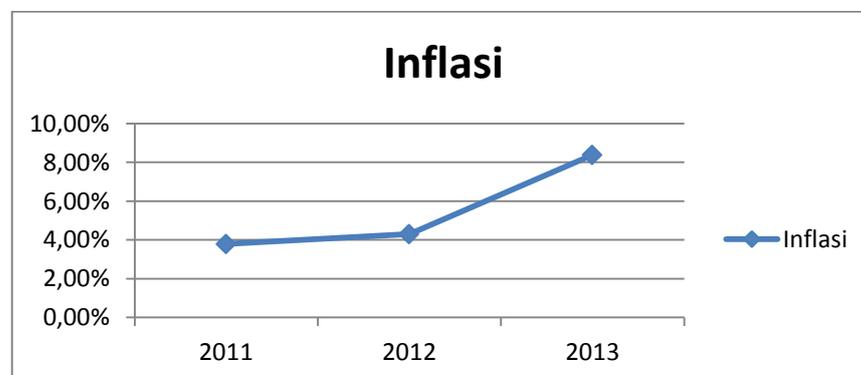
Sumber: Diolah, Statistik perbankan syariah 2011-2013

ROA pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan sebesar 2,67% menjadi 2,64% dan searah dengan FDR yang juga mengalami penurunan sebesar 127,71% menjadi 120,96%, tetapi pada tahun 2012-2013 ROA tidak searah dengan FDR dimana ROA mengalami peningkatan sebesar 2,64% menjadi 2,79% sedangkan FDR mengalami penurunan yang sebelumnya 120,96% menjadi 120,93%.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yakni inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian.⁵ Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian. Dampak inflasi bagi para penabung menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang yang semakin menurun. Sehingga dampak tersebut akan mempengaruhi pula uang yang akan digunakan untuk pembiayaan pada bank kepada nasabah.

Bila dilihat data inflasi Badan Pusat Statistik terkait periode 2011-2013

Gambar 1.6



⁵ Wahyu, Devi Susanty. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan., Vol 13, (No.2). Jurkubank.files.wordpress.com. Mei 2014

Sumber: Data Diolah, Badan Pusat Statistik 2015.

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2013 diatas, Inflasi yang terjadi pada tahun 2011-2012 menunjukkan peningkatan sebesar 3,79% menjadi 4,3% tidak searah dengan FDR yang mengalami penurunan sebesar 127,71% menjadi 120,96%, Inflasi pada tahun 2012-2013 juga mengalami peningkatan sebesar 4,3% menjadi 8,38% kali ini juga tidak searah dengan FDR yang juga mengalami penurunan sebesar 120,96% menjadi 120,93%. Hal ini dikarenakan dampak dari Inflasi yang meningkat cenderung mengakibatkan penurunan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Mempelajari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Tetapi dalam penelitian sebelumnya telah memberikan bukti bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar-kecilnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh sebuah bank. Untuk itu dalam penelitian ini akan mengkaji ulang dari penelitian sebelumnya serta penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode Januari 2011- Desember 2013, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Untuk membedakan dengan penelitian terdahulu maka variabel yang digunakan adalah *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), serta faktor eksternal yakni tingkat Inflasi.

Yang mempengaruhi besar kecilnya Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2011- 2013.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia ?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia ?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia ?
5. Apakah NPF, CAR, ROA, dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap FDR pada BPRS di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia.
2. Menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia.
3. Menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia.
4. Menguji pengaruh Inflasi terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia.

5. Menguji pengaruh NPF, CAR, ROA, Inflasi terhadap FDR pada BPRS di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Praktisi

Memberikan evaluasi atas penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan serta memberikan bukti mengenai pengaruh NPF, CAR, ROA, dan Inflasi terhadap FDR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Bagi Pengembangan Teori Perbankan

Untuk menambah wawasan dan kreatifitas berfikir, serta dapat dijadikan sarana pembandingan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapannya di dunia kerja serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhi FDR khususnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah referensi untuk penelitian sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah khususnya dan mengacu motivasi untuk melakukan penelitian sejenisnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih bai serta menambah khasanah pengetahuan dibidang perbankan terkait dengan pembiayaan dan FDR khususnya serta sebagai dasar acuan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan judul penelitian ini

E. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meneliti sebagian variabel-variabel rasio keuangan bank yang meliputi *Non performing financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dikarenakan kinerja keuangan sebuah bank itu pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang antara lain terkait besar kecilnya rasio-rasio keuangan tersebut sedangkan faktor eksternal yakni Inflasi dimana masih jarang ditemukan seberapa besar pengaruhnya faktor inflasi terhadap *Financial to Deposit Ratio* (FDR)

2. Batasan Penelitian

Objek penelitian ini yang hanya mencakup Bank Pembiayaan Rakyat di Indonesia yang datanya disajikan dalam statistik perbankan syariah periode 2011-2013.

Indikator :

- a. NPF (*Non Performing Financing*)
- b. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)
- c. ROA (*Return on Asset*)
- d. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)
- e. Inflasi

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Non performing financing* (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Rumus NPF yaitu :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan bank. Rumus CAR yaitu :

$$CAR = \frac{Modal}{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)} \times 100\%$$

3. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Rumus ROA yaitu :

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100\%$$

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan ratio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Rumus FDR yaitu :

$$FDR = \frac{Pembiayaan yang diberikan}{DPK} \times 100\%$$

5. Inflasi merupakan kondisi perekonomian yang secara langsung akan mempengaruhi iklim usaha perbankan dalam pembiayaan dan pengumpulan dana.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN SKRIPSI

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusah masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, jenis dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data serta teknis analisis.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan presentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. NPF diharapkan mempunyai hubungan negatif dengan penawaran pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan Bank.⁶ Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. Padahal besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Kemacetan fasilitas pembiayaan disebabkan oleh dua faktor yaitu :

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan pembiayaan yang disebabkan nasabah diakibatkan dua hal yaitu :

1. Adanya unsur kesengajaan
2. Adanya unsur tidak sengaja Implikasi dari *Non Performing Financing*.⁷

Non Performing Financing (NPF) yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat. Rumus perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁸

B. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, edisi kedua*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 68

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 227

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya.

Fungsi modal bagi bank adalah:

1. Melindungi depositan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu resiko usaha.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
3. Membiayai kebutuhan aktiva tetap.
4. Mengusahakan kekurangan modal tersebut dari luar.⁹

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan bank. Bank Indonesia menetapkan CAR yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila ketentuan CAR tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi ekspansi penyaluran dana.¹⁰

Permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mencakup eksposur saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu rasio kecukupan modal yang didapatkan dari perhitungan :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

⁹ Taswan, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: UPP, AMP, YKPN, 2006), hal 203

¹⁰ Herman Dumawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.18

Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual). Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari modal inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%. Sedangkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko pembiayaan yang melekat dan beberapa pos dalam off_balance sheet yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko pembiayaan yang melekat. ATMR diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko. Semakin likuid aktiva risikonya nol dan semakin tidak likuid bobot risikonya 100, sehingga risiko berkisar antara 0-100%.¹¹

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi keruagian yang diakibatkan oleh

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 231

penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan CAR di atas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen setahun.¹²

C. Return on Asset (ROA)

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.¹³

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi pengamatan asset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana dengan lebih luas.¹⁴

¹² Wibowo, *Manajemen Kinerja Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 181

¹³ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 144

¹⁴ *Ibid*, hal 145

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan¹⁵. Profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu *rentable*. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar¹⁶.

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal

¹⁵ Mamduh M. Hanafi, Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan (Edisi 4)*, (Jakarta: UPP STIM YKPN. 2003). Hal 83

¹⁶ Munawir., *Analisa Laporan Keuangan,...*, Hal 51.

ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%.

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan.¹⁷

¹⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbanka, edisi kedua,...*, hal 68

D. Inflasi

Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara terus menerus yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Dari pengertian ini, inflasi mempunyai penjelasan bahwa inflasi merupakan suatu gejala dimana banyak terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan diseluruh penjuru suatu Negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadi inflasi tersebut.¹⁸

a) Penggolongan Inflasi

Penggolongan berdasarkan atas besarnya laju inflasi :

1. Inflasi Menyerap (*Creeping Inflation*)

Berdasarkan inflasi ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang sama.

2. Inflasi Menengah atau Ganas (*Galloping Inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi (antara 10% sampai 50% per tahun). Sebagai konsekuensinya, masyarakat hanya

¹⁸ Nopirin, *Ekonomi Internasional, edisi kedua*. (Yogyakarta: BPFE, 1990). Hal 25

memegang sejumlah uang yang minimum yang hanya diperlukan untuk transaksi harian saja.

3. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik 5 atau 6 kali, masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk menyimpan uang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja dan ditandai dengan laju inflasi diatas 50% pertahun.¹⁹

Penggolongan berdasarkan asal inflasi :

1. *Domestic inflation*

Domestic Inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri yang timbul karena:

- a) Meningkatkan permintaan efektif dari masyarakat terhadap barang-barang di pasar, sedangkan kenaikan penawaran dari barang-barang tersebut tidak mampu mengimbangi laju permintaannya.
- b) Defisit anggaran belanja dibiayai dengan percetakan uang baru.
- c) Meningkatnya biaya produksi barang dalam negeri yang mengakibatkan naiknya harga jual.

2. *Foreign inflation*

Foreign Inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yang mempunyai dampak diantaranya:

1. Secara langsung menaikkan Indeks Biaya Hidup (IBH) karena barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.

¹⁹ Agmon Tamir, *Dis Inflasi, dan Keputusan Keuangan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal 65

2. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost inflation*).
3. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor yang berusaha mengimbangi pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut.²⁰

b. Dampak Negatif Inflasi

Efek yang timbul dari inflasi diantaranya adalah:

1. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.

2. Efek Efisiensi

Pengaruh inflasi dapat terjadi pada perubahan pola alokasi faktor produksi dengan inflasi. Permintaan akan suatu barang tertentu mengalami kenaikan lebih besar dari barang-barang lain yang juga dapat berakibat pada kenaikan yang lebih besar dari barang-barang yang juga dapat mengubah alokasi faktor produksi yang ada.

3. Efek Terhadap Output

Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan

²⁰ *Ibid.* , hal 66

upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi.²¹

c. Cara Mengatasi Inflasi

Cara mengatasi inflasi dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui jumlah uang yang beredar. Diatur oleh bank sentral melalui cadangan minimum yang dinaikan agar jumlah uang menjadi lebih kecil sehingga dapat menekan laju inflasi.

2. Kebijakan Fiskal

Menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi harga, kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijakan dan yang berkaitan dengan output

Kenaikan jumlah output dapat dicapai dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor harga cenderung meningkat dan menurunkan harga, dengan demikian kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.

4. Kebijakan harga dan indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan *ceilling* harga serta berdasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji atau upah.²²

Peran Perbankan dalam memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang

²¹ *Ibid.*, hal 67

²² *Ibid.*, hal 68

wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak luar bank sentral termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrument dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh Indonesia, termasuk bank Indonesia.²³

E. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi FDR maka penyaluran dana (pembiayaan) oleh bank akan meningkat.²⁴

²³ Toni hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 56

²⁴ Eris munandar, "*Pengaruh Dana pihak ketiga, loan to deposit ratio, dan return on asset terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri*" skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Pengertian lainnya FDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan syariah yang berhubungan dengan aspek likuiditas. FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan²⁵. FDR disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (pembiayaan) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah

²⁵ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999 xv, hlm 98.

sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110 %. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.²⁶

1. Penyebab FDR Rendah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbankan nasional pernah mengalami kemerosotan jumlah pembiayaan karena diserahkan ke BPPN untuk ditukar dengan obligasi rekapitalisasi. Begitu besarnya nilai pembiayaan yang keluar dari sistem perbankan di satu sisi dan semakin meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya belum berhasil mengangkat angka FDR secara signifikan.

2. Fungsi FDR

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan maka angka FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain :

- a. Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
- b. Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (FDR minimum 50%),

²⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank...*, hal. 272

- c. Sebagai faktor penentu besar-kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank.
- d. Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

Begitu pentingnya arti angka FDR, maka pemberlakuannya pada seluruh bank sedapat mungkin diseragamkan. Maksudnya, jangan sampai ada pengecualian perhitungan FDR di antara perbankan. Untuk menghitung FDR :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{DPK} \times 100\%$$

Jika bank mempunyai FDR yang sangat tinggi, maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian²⁷. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Angka FDR berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka FDR seharusnya berada disekitar 85%-110% (manurung, 2004).²⁸

²⁷ Susilo, Sri Y. Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: salemba empat, 2000), hal 185

²⁸ Mandala, Manurung dan Pratama rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (kajian konstektual Indonesia) Buku II*. (Yogyakarta: BPFE), hal 48

3. Likuiditas Bank

Menurut Simorangkir. Likuiditas adalah kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan.²⁹

Beberapa penulis memberikan pengertian likuiditas dalam persepektif perbankan sebagai berikut:³⁰

1. Joseph E. Burns

Likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Oliver G. Wood, Jr

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.

3. William M. Glavin

Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban.

Hasibuan³¹. Menyatakan bahwa likuiditas merupakan suatu indikator tingkat kepercayaan nasabah. Likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan³²:

²⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 144

³⁰ Mita Puji Utari, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, ROA, dan BOPO Terhadap FDR* (Yogyakarta :Skripsi, 2011), hal 22

³¹ Malayu Hasibuan S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi(Jakarta: Bumi aksara, 2002), hal 87

³² Susilo, sri Y. dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.....*, hal 187

1. Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan Bank Sentral.
2. Penarikan dana oleh para deposan.
3. Penarikan dana oleh debitur.
4. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyimpanan dana untuk menjaga masalah likuiditas dapat diklasifikasikan kedalam empat hal³³:

1. *Primary Reserve* (cadangan utama)

Primary Reserve dapat dikatakan sebagai kas suatu kegiatan perbankan atau rekening cadangan yang lebih besar dari *legal reserve* yang dibutuhkan.

2. *Secondary Reserve* (cadangan kedua)

Secondary Reserve terdiri dari *federal funds old* dan surat-surat berharga pemerintah jangka pendek. Dapat ditambahkan disini bahwa surat-surat berharga yang masuk kedalam klasifikasi ini adalah surat berharga yang harus mempunyai kualitas bagus (sangat kecil risiko *default/gagal*), jatuh tempo untuk jangka pendek (kurang dari satu tahun), mudah diperjualbelikan.

3. *Tertiary reserve* (cadangan ketiga)

Tertiary reserve adalah dirancang untuk memenuhi perlindungan likuiditas terhadap perubahan-perubahan jangka panjang seperti peningkatan permintaan

³³ Mita Puji Utari, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, ROA, dan BOPO terhadap NPF...*, hal 24

peminjaman atau penurunan deposit yang masuk. Surat-surat berharga pemerintah dengan masa jatuh tempo sekitar 1 hingga 2 tahun adalah termasuk kedalam klasifikasi ini.

4. *Investmen reserve* (cadangan investasi)

Investmen reserve adalah cadangan untukantisipasi likuiditas yang biasanya kepada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Biasanya yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah surat-surat berharga dengan masa jatuh tempo lebih besar dari dua tahun. Klasifikasi-klasifikasi cadangan ini menyebabkan bank harus melakukan suatu investasi portofolio dengan masa jatuh tempo yang berbeda.

Kuncoro dan Suhardjono. Menyatakan bahwa pengelolaan likuiditas ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana, sehingga dalam memenuhi kewajibannya bank tidak perlu harus mencari dana dengan suku bunga yang relatif tinggi di pasar uang atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan kerugian yang relatif besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank.³⁴ Apabila keadaan ini terjadi dan terus berlanjut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank.

F. Perbankan

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa.³⁵ Adapun pemberian kredit itu dilakukan

³⁴ Kuncoro dan suhardjono, *Manajemen Perbankan (teori dan aplikasi)*, (Yogyakarta: BPFE), hal 32

³⁵ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 110

baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga ataupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁶

Bank merupakan lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam aktivitasnya bank merupakan lembaga intermediasi antara pemilik sumber dana dan pihak yang memerlukan dana. Dewasa ini bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang yang melakukan berbagai aktivitas khususnya dalam melakukan transaksi.³⁷

Dalam praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis Perbankan berdasarkan UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

³⁶ *Ibid.*, hal 117

³⁷ *Ibid.*, hal 117

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga bank komersil (*commercial bank*).

- b. Bank perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.³⁸

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap perbankan Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Berdasarkan kebijakan tersebut, perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.³⁹

Disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menempatkan sistem perbankan Islam sebagai salah satu system perbankan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak menyebut dan menjelaskan secaralangsung bank Islam itu sendiri. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, istilah bank Islam baru

³⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, edisi revisi. (Jakarta: Rajawali Pers), hal 55

³⁹ Dwi suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 1

dijelaskan. Bank Islam yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 adalah bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi dalam dua pertauran yang dikeluarkan tersebut tidak menyebutkan bank Islam atau bank Syariah, namun hanya sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Istilah itu pun dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 hanya disebutkan dua kali yaitu dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) yang mengatur Bank Perkreditan Rakyat. Pasal ini mengatur usaha-usaha yang dilakukan bank umum, salah satunya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.⁴⁰

Perkembangan selanjutnya yaitu periode 1992-1998. Ada dua kebijakan mendasar yang berkaitan pengembangan perbankan Islam di Indonesia pada periode ini, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan larangan melakukan *dual system of banking* dan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam periode 1992-1998 adalah larangan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan *dual system of banking* bagi konvensional dan bank dengan prinsip bagi hasil. Sebab, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya kegiatan usaha dengan sistem bagi hasil, baik dalam bentuk Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat merupakan bagian dari system perbankan nasional yang khusus melaksanakan kegiatan usaha perbankan hanya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hal 5

⁴¹ *Ibid.*, hal 7

G. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴² Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁴³

1. Sejarah Berdirinya BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh

⁴² Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonesia), hal. 79

⁴³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), hal. 177

BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui , sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang semacamnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum islam. BPR tersebut di beri nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif

dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala *outlet retail banking (rural bank)*.⁴⁴

UU No. 10 Tahun 1998 yang merubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi: Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴⁵

2. Tujuan BPRS

Tujuan didirikannya BPR Syariah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 182

⁴⁵ *Ibid.*, hal 183

- c. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yg memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sbg berikut:

1. BPR Syariah tdk bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dgn melakukan sosialisasi/penelitian kpd usaha-usaha berskala kecil yg perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yg baik.
2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yg waktu perputaran uangnya jangka pendek dgn mengutamakan usaha skala menengah & kecil.
3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yg akan diberi pembiayaan.

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber hanya menyebutkan butir-butirnya saja, keterangan tiap-tiap butir ditambahkan oleh penulis. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya ternasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.⁴⁶

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.....*, hal 60

- a. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di kecamatan-kecamatan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi.
- c. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai ta'awun (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai ta'awun inilah akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Djazuli dan Yadi Janwari⁴⁷. Menjabarkan tiga tujuan diatas sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.

3. Usaha Usaha BPRS

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah.⁴⁸

Dalam usaha anggaran dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Simpanan Amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadiah, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan pada nasabahnya.⁴⁹

b. Tabungan wadiah

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung

⁴⁷ Djazuli dan yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 108

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 110

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.....*, hal.

resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadiah itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah setiap bulannya.

c. Deposito wadiah mudharabah

Dalam produk di bank menerima deposito berjangka (*time and investmen account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat membentuk wadi'ah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1,2,3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah/ deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan /kredit yang dilakukan pada nasabah –nasabah lainnya.⁵⁰

Fasilitas pegerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan kepemilikan kendaraan, tabungan kepemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas BPR syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan pada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal 66

⁵¹ Djazuli dan yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat...*, hal. 112

Sementara, dalam menyalurkan dana masyarakat BPR yariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan seperti :

a. Pembiayaan mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usha bagi proyek yang di kelola oleh pngusaha. Keuntungan yang diperoleh akan di bagi (perjanjian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

b. Pembiayaan musyarakah

Dalam pembiayaan muyarakah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama membiyai suatu proyek yang juga dikelola secara brsama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai penyertaan masing-masing pihak.

c. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

Dalam bentuk pembiayaan ini, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pemblian sesuatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna unuk mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.⁵²

Namun begitu, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁵² *Ibid.*, hal 113

- b. Memberikan pembiayaan.

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

- c. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya.⁵³

4. Ketentuan Pendirian BPRS

Adapun beberapa hal yang harus di ketahui dalam pendirian BPRS yaitu :

- a. Dalam mendirikan BPRS syariah harus mengacu dalam bentuk hukum BPR Syariah yang telah ditentukan dalam UU. 10 tahun 1999 pasal 2, Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan NO. 10 tahun 1999 pasal 2, bentuk suatu hukum BPR syariah dalam berupa: Pemberian ijin pendirian BPR syariah, sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dua tahap :
- b. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR syariah.
- c. Ijin usaha, yaitu ijin yang dibrikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syaria setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.⁵⁴

SK DIR BI NO. 32/36/1999 tidak memberikan kemungkinan bagi pihak asing untuk mendirikan BPR syariah. Menurut ketentuan pasal 15 SK DIR BI tersebut, yang dapat menjadi pemilik BPR syariah adalah pihak-pihak yang:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeny, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum Islam...*, hal 157

⁵⁴ *Ibid.*, hal 158

- b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, antara lain:
1. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Bersedia mengembangkan BPR syariah yang sehat

Adapun syarat-syarat lain untuk pendirian BPR syariah adalah sebagai berikut:

- a. BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direktur Bank Indonesia.
- b. BPR syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia
 3. Pemerintah Daerah, atau dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b.⁵⁵

Dalam rangka menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR Syariah ditentukan bahwa :

- a. BPR Syariah dilarang melakukan kegiatan usahasecara konvensional
- b. BPR Syariah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR Konvensional
- c. BPR Syariah yang semula izin usahanya sebagai BPR Konvensional tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR Konvensional kembali.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 159

Dilihat dari segi kepemilikannya BPR dapat dibedakan menjadi dalam 3 (tiga) golongan yakni :

a. Milik Pemerintah Daerah (PD)

Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Daerah

b. Milik Swasta (PT)

Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang di tetapkan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/Anggaran Dasar.

c. Milik Anggota Koperasi (Koperasi)

Pengawasan dilakukan oleh badan Pemeriksa yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota / Anggaran Dasar.⁵⁶

5. Kendala Pengembangan BPRS

Dalam prakteknya BPR syariah mengalami berbagai kendala, antara lain adalah:

a. Kiprah BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah.

b. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki BPR syariah sehingga cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah.

c. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT.⁵⁷

6. Strategi Pengembangan BPRS

⁵⁶ *Ibid.*, hal 161

⁵⁷ Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi...*, hal 71

Strategi pengembangan BPR syariah yang perlu di perhatikan sebagai adalah sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah, bukan saja produknya tapi juga sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan menggunakan pemasaran yang halal, seperti melalui informasi mengenai BPR syariah di media media masa. Hal lain yang di tempuh adalah perlunya kerja sama BPR syariah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR syariah untuk mensosialisasikan BPR syariah.
- b. Usaha usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan pelatihan megenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama di antara BPR syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek (*shortcourse*) lembaga keuangan syariah.
- c. Tujuan didirikan *shortcourse* untuk menyediakan SDM yang siap kerja di lembaga keuangan syariah. khusus BPR syariah.
- d. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan di ketahui berapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja di antar BPR syariah, demikian juga kesinambungan kerja BPRsyariah dengan bank syariah dan BMT lainnya yang ada di Indonesia.

- e. BPR syariah bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat dimana BPR syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga pola ini dapat membantu BPR syariah dalam mengetahui gejala gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPR syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.⁵⁸

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Pratama.⁵⁹ Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan pada Bank Umum di Indonesia periode 2005-2009 (secara bulanan). Variabel independen yang digunakan adalah DPK, CAR, dan suku bunga SBI sedangkan variabel dependn ialah kredit perbankan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menyebutkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Suku bunga SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Nandadipa.⁶⁰ Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap LDR. Variabel independen yang digunakan adalah CAR, NPL, Inflasi, DPK dan

⁵⁸ *Ibid.*, hal 73

⁵⁹ Billy Arma Pratama, " *Analisis Faktor Yang mempengaruhi kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan Studi Pada Bank Umum di Indonesia*", (skripsi : S1 Universitas Diponegoro, 2010)

⁶⁰ Seandy nandadipa, " *Analisis pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate terhadap FDR*" (Skripsi : 2010)

Exchange Rate sedangkan variabel dependen ialah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menyebutkan bahwa CAR, NPL, Inflasi, Exchange Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.

Prayudi.⁶¹ Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM terhadap LDR. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen yakni CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM dengan uji F, secara bersama-sama berpengaruh terhadap LDR. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel CAR, NPL, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan Variabel ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,255 menunjukkan bahwa LDR dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penelitian sebesar 25,5 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Utari.⁶² Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Asset*), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap FDR dengan tingkat signifikan $0,192 > 0,050$, NPF berpengaruh negatif signifikan

⁶¹ Arditya Prayudi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan*, *BOPO*, *Return On Asset*, *Net Interest Margin* terhadap *Loan to Deposit Ratio*" vol 17. No.2. 2011.

⁶² Mita Puji Utari, "Analisis Pengaruh *CAR*, *NPF*, *ROA*, dan *BOPO* Terhadap *FDR*" (skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2011)

terhadap FDR dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,050$, ROA berpengaruh negative tidak signifikan terhadap FDR dengan tingkat signifikansi $0,560 > 0,050$, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap FDR dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,050$, kelima variabel berpengaruh sebesar 24,4 % terhadap FDR.

Setianingsih.⁶³ Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, dan ROA terhadap penyaluran pembiayaan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan, NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan, dan CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan perbankan.

Ramadhan.⁶⁴ Melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2007-2011. Variabel independen yang digunakan adalah CAR, ROA, dan NPL sedangkan variabel dependennya adalah LDR. Metode analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil, uji statistik $-t$, dan dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dan ROA tidak berpengaruh secara signifikan dan berarah positif terhadap LDR, NPL berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap LDR.

⁶³ Kristiana Setianingsih, " *Pengaruh CAR, NPF, dan ROA terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*" (skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2012)

⁶⁴ Shandy Bintang Ramadhan, " *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan*" (skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Muna.⁶⁵ Melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah NPF, CAR, ROA variabel dependen ialah Pembiayaan BPRS. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menyebutkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan BPRS. CAR dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan BPRS.

Tabel 2.1

No.	Peneliti/ Judul Penelitian	Variabel penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Billy Arma Pratama (2010)	Independen: DPK CAR Suku bunga (SBI) Dependen: Kredit	Analisis regresi berganda dengan F-test dan t-test	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Suku Bunga SBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.
2.	Seandy Nandadipa (2010)	Independen: CAR NPL Inflasi DPK Exchange Rate Dependen: LDR	Analisis regresi berganda	CAR, NPL, Inflasi, Exchange rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. Pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.
3.	Arditya Prayudi	Independen:	Analisis	Secara simultan variabel-

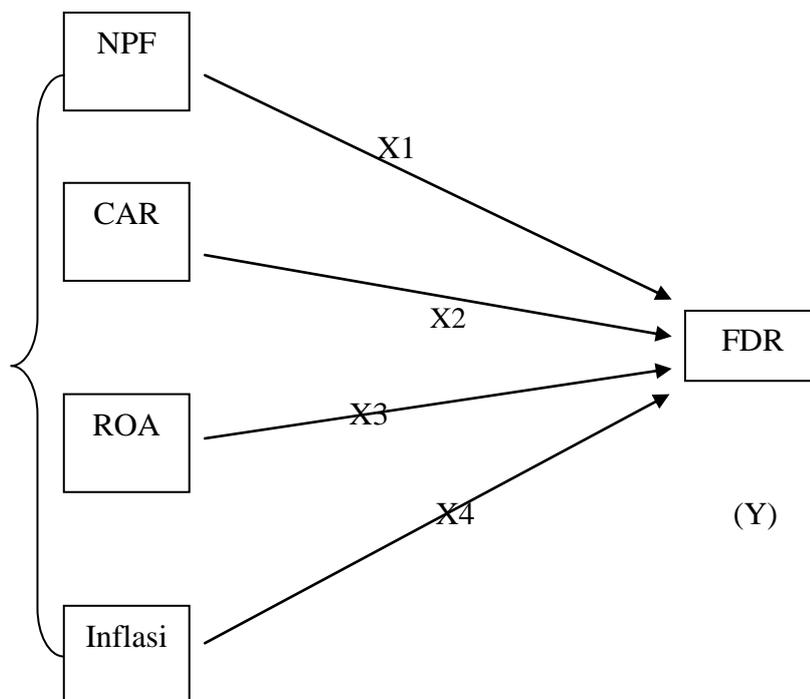
⁶⁵ Neil Al Muna, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Sarana Pertanian pada BPRS di Indonesia" (Skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2013)

	(2011)	CAR NPL BOPO ROA NIM Dependen: LDR	regresi berganda	variabel independen, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan NIM dengan uji F, secara bersama-sama berpengaruh terhadap LDR. Secara parsial dengan uji-t, variabel, CAR, NPL, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan variabel ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR.
4.	Mita Puji Utari (2011)	Independen: CAR NPF ROA BOPO Dependen: FDR	Analisis regresi berganda	CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap FDR. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap FDR. ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap FDR. BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap FDR.
5.	Kristiana Setianingsih (2012) 2008-2010	Independen: CAR NPF ROA Dependen: Pembiayaan	Analisis regresi panel data	CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. NPF berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan.
6.	Shandy Bintang Ramadhan(2013)	Independen: CAR ROA NPL Dependen: LDR	Analisis regresi berganda	CAR dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR. NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.
7.	Neil Al Muna (2013)	Independen: NPF CAR ROA Dependen: Pembiayaan	Analisis regresi berganda	NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. CAR dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan.
8.	Elsa Almar'atus Solekhah (2015)	Independen: NPF	Analisis Regresi	NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR.

		CAR ROA Inflasi Dependen: FDR	Linier Berganda	CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR. ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR. NPF, CAR, ROA, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR.
--	--	---	--------------------	--

I. Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah, landasan teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa, *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On asset* (ROA), dan Inflasi berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. NPF berpengaruh terhadap FDR.
- b. CAR berpengaruh terhadap FDR.
- c. ROA berpengaruh terhadap FDR.
- d. Inflasi tidak berpengaruh terhadap FDR.
- e. NPF, CAR, ROA, dan Inflasi berpengaruh terhadap FDR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis secara empiris dengan prosedur statistika atau permodelan matematis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yakni asosiatif dengan memakai statistik inferensial parametrik, artinya setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk mengolah data dan kemudian menganalisis serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut yang telah didapat.

B. POPULASI, SAMPLING, DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁶ Populasi dalam penelitian ini yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia periode laporan keuangan tahun 2006-2013.

⁶⁶ Agus Eko Sujianto "Modul Aplikasi Statistik: Statistical Program For Sosial Science (SPSS), hal 80

2. *Sampling*

Sampling adalah proses dan cara mengambil sampel atau contoh untuk menduga keadaan suatu populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*). *Sampling* nonprobabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria tertentu sebagai berikut :

- a. Seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara umum tahun 2011-2013
- b. Memiliki laporan keuangan yang menyediakan informasi terkait FDR, NPF, CAR, ROA
- c. Laporan keuangan dalam bentuk bulanan
- d. Laporan tingkat Inflasi secara global dalam bentuk bulanan.

3. **Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁷ Dengan kata lain sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan pendekatan data berkala (*time series*) dengan skala bulanan dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2011-2013.

C. SUMBER DATA, VARIABEL, DAN SKALA PENGUKURANNYA

1. Sumber Data

⁶⁷ *Ibid.*, hal 85

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu jenis sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi (pengamatan), studi kepustakaan, kajian literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan studi dokumentasi.

2. Variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁸ Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan diklasifikasikan ke dalam variabel independen dan variabel dependen. Variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) (X1), *Capital Asset Ratio* (CAR) (X2), *Return on Asset* (ROA) (X3), Inflasi (X4).
- b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah “*Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia”.

3. Skala pengukurannya

Skala pengukuran adalah penunjukan angka-angka pada suatu variabel menurut aturan yang telah ditentukan. Didalam penelitian ini menggunakan salah satu jenis skala pengukuran yaitu skala Rasio.

⁶⁸ *Ibid.*, hal 87

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Statistik Perbankan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dipublikasikan. Serta dengan observasi (pengamatan).

E. ANALISIS DATA

Untuk menggunakan analisis regresi linier berganda sehingga diperoleh model yang baik, maka dituntut terpenuhinya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sehingga sebelum melakukan analisis regresi berganda dilakukan uji normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Pengujian normalitas data menggunakan uji kolmogorov-smirnov one sampel test dengan rumus :

$$D = \frac{Max}{Fo(Xi) - SN(Xi)}$$

$$SN(Xi) = \frac{Fi}{N}$$

Fo (X) = Fungsi distribusi komulatif yang ditentukan

$SN(X) =$ Distribusi frekuensi komulatif yang diobservasi dari suatu sampel random dengan N Observasi.

$i = 1, 2, \dots, N$

adapun kriteria uji : jika probabilitas signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.⁶⁹

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Dengan cara lain untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan :

1. Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a)
2. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* (a) dan *Variance inflation faktor* (VIF) dapat dicari dengan, sebagai berikut :

Besar nilai *tolerance* (a): $a = 1 / VIF$

Besar nilai *variance inflation faktor* (VIF): $VIF = 1 / a$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung VIF.

⁶⁹ Sugiyono, *metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: CV Alfabeta, 2004) hal,325

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung $> a$ dan VIF hitung $< VIF$.

b. Uji autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Uji Durbin – Watson (DW Test)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi +	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi +	Non decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi –	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi –	Non decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, + atau -	Tidak ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

Sumber : (Ghozali, 2009)⁷⁰

c. Uji heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. Dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) untuk variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi-Y rill).

⁷⁰ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multifariate dengan program SPSS Edisi ketiga. (Semarang: UNDIP) hal 133

Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah ataupun di atas titik original (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang tertentu.

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini yaitu analisis regresi linier berganda, dengan model dasar sebagai berikut:⁷¹

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = FDR

X₁ = Non Performing Finance (NPF)

X₂ = Capital Adequacy Ratio (CAR)

X₃ = Return on Asset (ROA)

X₄ = Inflasi

a = konstanta

b₁-b₄ = koefisien regresi variabel bebas

e = variabel residual (tingkat eror)

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang meliputi NPF, CAR, ROA, dan Inflasi berpengaruh

⁷¹ *Ibid.*, hal 108

terhadap FDR baik secara individu maupun bersama-sama. Maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama yang berbunyi NPF berpengaruh terhadap FDR di uji menggunakan Uji signifikan Parsial (Uji t).
2. Hipotesis kedua yang berbunyi CAR berpengaruh terhadap FDR di uji menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji t).
3. Hipotesis ketiga yang berbunyi ROA berpengaruh terhadap FDR di uji menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji t).
4. Hipotesis keempat yang berbunyi Inflasi berpengaruh terhadap FDR di uji menggunakan Uji Signifikan Parsial (Uji t).
5. Hipotesis kelima yang berbunyi NPF, CAR, ROA, dan Inflasi berpengaruh terhadap FDR di uji menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji F).

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 Ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 Diterima.

a. Uji signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antar t-hitung dengan t-tabel. Dari hipotesis :

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara Variabel NPF terhadap FDR
 H_a = Terdapat pengaruh antara Variabel NPF terhadap FDR

2. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara Variabel CAR terhadap FDR
 H_a = Terdapat pengaruh antara Variabel CAR terhadap FDR
3. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara Variabel ROA terhadap FDR
 H_a = Terdapat pengaruh antara Variabel ROA terhadap FDR
4. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara Variabel Inflasi terhadap FDR
 H_a = Terdapat pengaruh antara Variabel Inflasi terhadap FDR

Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan sebesar 5%. Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (NPF, CAR, ROA, dan Inflasi) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (FDR). Atau untuk mengetahui apakah model regresi

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Dari hipotesis :

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara variabel NPF, CAR, ROA, dan Inflasi terhadap FDR

H_a = Terdapat pengaruh antara variabel NPF, CAR, ROA, dan Inflasi terhadap FDR

Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi 0,05 dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. *Adjusted (R²)*

Adjusted R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi pengaruh variabel independen (NPF, CAR, ROA, dan Inflasi) secara serentak terhadap variabel dependen (FDR). koefisien ini

menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BPRS di Indonesia

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank Pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tanggal 27 oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU

No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, PT. BPR Amanah Rabbaniyah di Kota Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, kedua BPR Syariah tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.

Selain itu latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala *outlet retail banking* (rural bank).

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari awal keberadaannya hingga akhir 2013 terdapat 163 BPRS dengan jumlah kantor 436. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara khusus statistik. Untuk mengintepresentasikan hasil statistik deskriptif dari FDR, NPF, CAR, ROA dan Inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Analisis Statistik Deskriptif Masing-masing Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financing to Deposit Ratio	36	11946.00	13958.00	1.2756E4	498.17904
Non Performing Finance	36	615.00	789.00	6.9811E2	38.43568
Capital Adequacy Ratio	36	2196.00	3012.00	2.4676E3	198.04378
Return On Asset	36	239.00	314.00	2.7714E2	17.14502
Inflasi	36	-35.00	329.00	43.7778	63.52237
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Output SPSS 16.0, data sekunder yang di olah 2015.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa n atau jumlah total data setiap variabel yaitu 36 buah yang berasal dari sampel laporan keuangan BPRS di Indonesia periode tahun 2011 sampai 2013. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai nilai minimum 119,46% dan nilai maksimum sebesar 139,58%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai

maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terendah dan tertinggi.

Pada tabel 4.1 di atas variabel *Non Performing Finance* (NPF) mempunyai nilai minimum 6,15% dan nilai maksimum sebesar 7,89%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari *Non Performing Finance* (NPF) terendah dan tertinggi.

Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai nilai minimum 21,96% dan nilai maksimum sebesar 30,12%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terendah dan tertinggi.

Return on Asset (ROA) mempunyai nilai minimum 2,39% dan nilai maksimum sebesar 3,14%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari mean-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari *Return on Asset* (ROA) terendah dan tertinggi.

Variabel Inflasi mempunyai nilai minimum -0,35% dan nilai maksimum sebesar 3,29%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai mean-nya hal ini menunjukkan bahwa banyaknya variasi antara nilai

maksimum dan minimum pada inflasi selama periode pengamatan. Atau kesenjangan yang rendah dari Inflasi terendah dan tertinggi.

Dalam hal ini akan dilakukan analisis untuk melihat tren masing-masing variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y	=	Nilai tren
a	=	Nilai konstanta
b	=	Nilai kemiringan
X	=	Nilai perolehan periode

Data X (periode) adalah data tahunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan Inflasi periode tahun 2011-2013, sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 3 observasi yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Tabel Bantuan Perhitungan Tren FDR Tahun 2011-2013

Tahun	Y	X	Y*X	X ²
2011	132,46	-1	-132,46	1
2012	125,82	0	0	0
2013	124,39	1	124,39	1
	382,67		-8,07	2

Berdasarkan hasil perhitungan diatas persamaan tren yang diperoleh adalah $Y = 127,55 - 4,035$. Hasil persamaan ini menunjukkan bahwa tren variabel FDR adalah tren negatif dimana ada kecenderungan penurunan FDR setiap tahunnya.

Tabel 4.3

Tabel Bantuan Perhitungan Tren NPF Tahun 2011-2013

Tahun	Y	X	Y*X	X ²
2011	7,01	-1	-7,01	1
2012	6,60	0	0	0
2013	7,32	1	7,32	1
	20,93		0,31	2

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, persamaan tren yang diperoleh adalah $Y = 6,97 + 0,155$. Hasil persamaan ini menunjukkan tren positif, hal ini mengindikasikan kenaikan NPF di setiap tahunnya.

Tabel 4.4

Tabel Bantuan Perhitungan Tren CAR Tahun 2011-2013

Tahun	Y	X	Y*X	X ²
2011	26,28	-1	-26,28	1
2012	24,69	0	0	0
2013	23,03	1	23,03	1
	74,00		-3,25	2

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, persamaan tren variabel CAR yang diperoleh adalah $Y = 24,66 - 1,625$. Hasil persamaan ini menunjukkan bahwa tren variabel CAR adalah tren negatif dimana ada kecenderungan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 4.5

Tabel Bantuan Perhitungan Tren ROA Tahun 2011-2013

Tahun	Y	X	Y*X	X ²
2011	2,69	-1	-2,69	1
2012	2,67	0	0	0
2013	2,94	1	2,94	1
	8,30		0,25	2

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, persamaan tren yang diperoleh adalah $Y = 2,76 + 0,125X$. Hasil persamaan ini menunjukkan tren positif, hal ini mengindikasikan kenaikan NPF di setiap tahunnya.

Tabel 4.6

Tabel Bantuan Perhitungan Tren Inflasi Tahun 2011-2013

Tahun	Y	X	Y*X	X ²
2011	0,31	-1	-0,31	1
2012	0,35	0	0	0
2013	0,63	1	0,63	1
	1,29		0,32	2

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, persamaan tren yang diperoleh adalah $Y = 0,43 + 0,16X$. Hasil persamaan ini menunjukkan tren positif, hal ini mengindikasikan kenaikan NPF di setiap tahunnya.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu populasi suatu data dapat dilakukan dengan

analisis uji statistik. Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Financing to Deposit Ratio	Non Performing Finance	Capital Adequacy Ratio	Return On Asset	Inflasi
N		36	36	36	36	36
Normal Parameters ^a	Mean	12756.3611	698.1111	2467.5556	277.1389	43.7778
	Std. Deviation	498.17904	38.43568	198.04378	17.14502	6.35224E1
Most Extreme Differences	Absolute	.097	.096	.217	.128	.147
	Positive	.097	.096	.217	.128	.141
	Negative	-.084	-.075	-.097	-.087	-.147
Kolmogorov-Smirnov Z		.584	.573	1.304	.769	.884
Asymp. Sig. (2-tailed)		.884	.898	.067	.595	.415

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah.

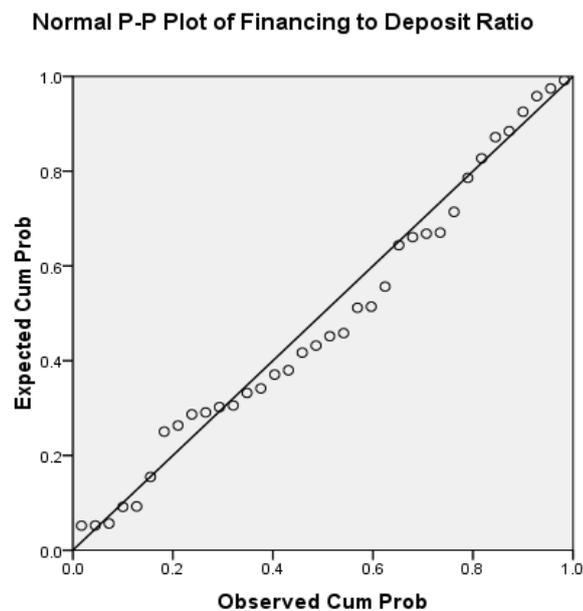
Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh adalah pada FDR sebesar 0,584, NPF sebesar 0,573, CAR sebesar 1,304, ROA sebesar 0,769 dan Inflasi sebesar 0,884 dan tingkat signifikansi pada masing-masing variabel lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

Metode yang lebih handal lain adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Grafik *normal probability plot* terlihat dalam gambar di bawah ini :

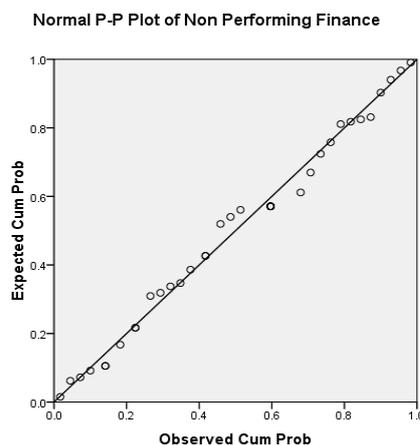
Gambar 4.1

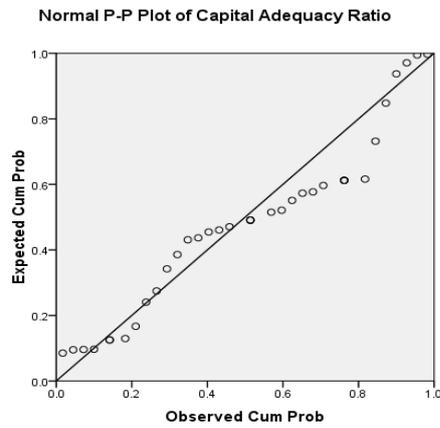
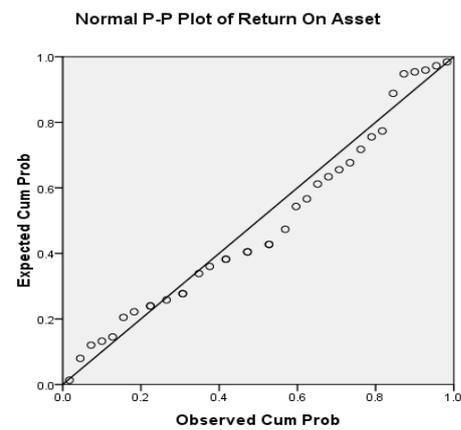
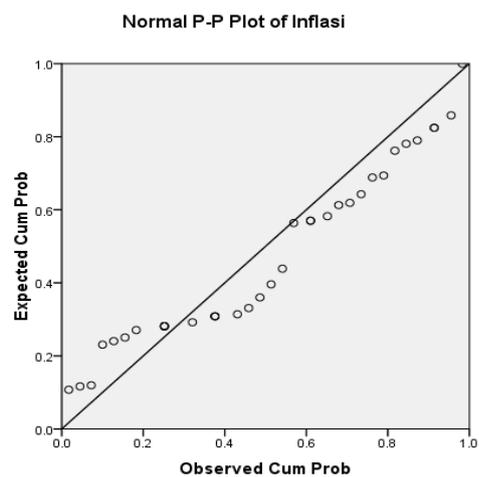
Uji Normalitas FDR dengan Normal P-P Plot



Gambar 4.2

Uji Normalitas NPF dengan Normal P-P Plot



Gambar 4.3**Uji Normalitas CAR dengan Normal P-P Plot****Gambar 4.4****Gambar 4.5****Uji Normalitas Inflasi dengan Normal P-P Plot**

Pada grafik *normal probability plot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari grafik tersebut maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Deteksi multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF. Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolonieritas dengan Matriks korelasi

Coefficient Correlations^a

Model		Inflasi	Non Performing Finance	Capital Adequacy Ratio	Return On Asset	
1	Correlations	Inflasi	1.000	-.035	.171	-.071
		Non Performing Finance	-.035	1.000	.219	-.376
		Capital Adequacy Ratio	.171	.219	1.000	.084
		Return On Asset	-.071	-.376	.084	1.000
	Covariances	Inflasi	1.363	-.087	.078	-.389
		Non Performing Finance	-.087	4.508	.181	-3.721
		Capital Adequacy Ratio	.078	.181	.151	.153
		Return On Asset	-.389	-3.721	.153	21.766

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Sumber: Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah.

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau tingkat korelasinya masih dibawah 95%, maka data dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

Selain menggunakan matriks korelasi, multikolonieritas juga dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF=1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Tingkat kolonieritas yang dapat ditolerir adalah nilai 0,10 sama dengan tingkat multikolonieritas 0,95. Berikut ini hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF :

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolonieritas dengan Nilai *Tolerance* dan VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Non Performing Finance	.784	1.276
	Capital Adequacy Ratio	.881	1.135
	Return On Asset	.816	1.226
	Inflasi	.949	1.054

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Sumber : Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah 2015.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $(t-1)$ atau sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson (D-W) pada perhitungan regresi dengan data statistik pada tabel Durbin-Watson.

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 ^a	.348	.264	427.40819	1.721

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset

b. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

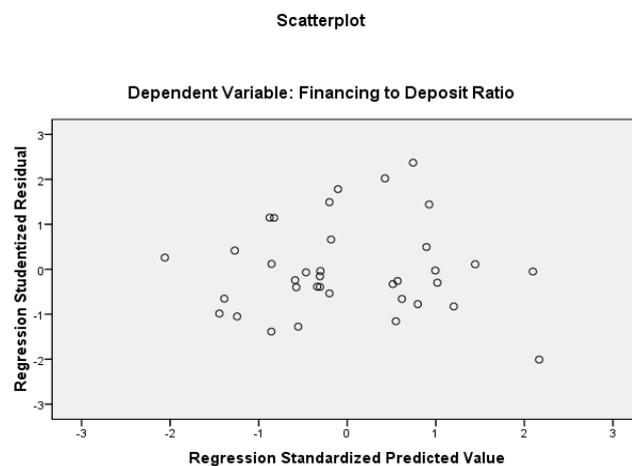
Sumber : Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah.

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS 16.0 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,721, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada penelitian ini.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu/pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.6
Diagram Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara

SRESID dan ZPREZID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi – Y sesungguhnya yang telah di *studentized*).

Dari gambar 4.1 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4. Uji Regresi Linier berganda

Dalam penelitian ini, uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji kekuatan variabel independen yang meliputi *Non Performing finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12300.058	2047.085		6.009	.000
	Non Performing Finance	5.062	2.123	.391	2.384	.023
	Capital Adequacy Ratio	.575	.389	.229	1.480	.149
	Return On Asset	-16.440	4.665	-.566	-3.524	.001
	Inflasi	1.357	1.168	.173	1.162	.254

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Sumber : Output SPSS 16.0, data sekunder yang diolah.

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 4.6 di atas, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 12300,58 + 5,062 \text{ NPF} + 0,575 \text{ CAR} - 16,440 \text{ ROA} + 1,357 \text{ Inflasi} + e$$

Dimana :

1. Konstanta sebesar 12300,58 artinya jika NPF, CAR, ROA dan Inflasi tidak ada maka FDR sebesar 12300,58 satu satuan.
2. Koefisien Regresi X1, sebesar 5,062 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan NPF akan menaikkan 5,062 satu satuan pada FDR. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan NPF akan menurunkan FDR sebesar 5,062 satu satuan dengan anggapan X1 tetap. Dilihat dari tabel diatas, NPF memiliki tren positif, artinya setiap kenaikan NPF akan meningkatkan FDR pada BPRS.
3. Koefisien Regresi X2, sebesar 0,575 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan CAR akan menaikkan 0,575 satu satuan pada FDR. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan CAR akan menurunkan FDR sebesar 0,575 satu satuan dengan anggapan X2 tetap. Dilihat dari tabel diatas, CAR memiliki tren positif, artinya setiap kenaikan CAR akan meningkatkan FDR pada BPRS.
4. Koefisien Regresi X3, sebesar -16,440 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ROA maka akan menurunkan 16,440 satu satuan FDR. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan ROA akan menaikkan FDR sebesar 16,440 satu satuan dengan anggapan X3 tetap. Dilihat dari

tabel diatas, ROA memiliki tren negatif, artinya setiap kenaikan ROA akan menurunkan FDR pada BPRS.

5. Koefisien Regresi X4, sebesar 1,357 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Inflasi maka akan menaikkan 1,357 satu satuan FDR. Dan sebaliknya setiap penurunan satu satuan Inflasi akan menurunkan FDR sebesar 1,357 satu satuan dengan anggapan X4 tetap. Dilihat dari tabel diatas, Inflasi memiliki tren positif, artinya setiap kenaikan Inflasi akan menaikkan FDR pada BPRS.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12300.058	2047.085		6.009	.000
	Non Performing Finance	5.062	2.123	.391	2.384	.023
	Capital Adequacy Ratio	.575	.389	.229	1.480	.149
	Return On Asset	-16.440	4.665	-.566	-3.524	.001
	Inflasi	1.357	1.168	.173	1.162	.254

a. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui arah dari koefisien beta regresi dan signifikansinya. Terlihat bahwa variabel *Non performing Finance* (NPF), *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan signifikansi 0,05. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel :

Hipotesis pertama mengenai variabel NPF diketahui bahwa nilai *Unstandardized Coefficients* B sebesar 5,062 menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap FDR. Nilai positif ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF akan mempengaruhi kinerja keuangan BPRS yang diproksi dengan FDR. Nilai signifikansi variabel NPF adalah 0,023 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel NPF terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, maka hipotesis teruji H.

Hipotesis kedua mengenai variabel CAR diketahui bahwa nilai *Unstandardized Coefficients* B sebesar 0,575 menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap FDR. Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan CAR akan mempengaruhi kinerja keuangan BPRS di Indonesia yang diproksi dengan FDR. Nilai signifikansi variabel modal adalah 0,149, dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel CAR terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR, maka hipotesis teruji.

Hipotesis ketiga mengenai variabel ROA diketahui bahwa nilai *Unstandardized Coefficients B* sebesar -16,440 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap FDR. Hasil yang negatif ini menunjukkan peningkatan ROA akan menurunkan kinerja keuangan BPRS di Indonesia yang diprosikan FDR. Nilai signifikan variabel ROA adalah 0,001, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ROA terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, maka hipotesis teruji.

Hipotesis keempat mengenai variabel Inflasi, diketahui bahwa *Unstandardized Coefficients B* sebesar 1,357 menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap FDR. Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan meningkatkan kinerja keuangan BPRS di Indonesia yang diprosikan FDR. Nilai signifikan variabel Inflasi adalah 0,254, dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Inflasi terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, maka hipotesis teruji.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3023371.798	4	755842.950	4.138	.008 ^a
	Residual	5663010.507	31	182677.758		
	Total	8686382.306	35			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset

b. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Sumber: Output SPSS 16.0. data sekunder yang diolah, 2015.

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 4,138 dimana lebih besar dari F-tabel sebesar 1,699 dengan nilai signifikan 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu NPF, CAR, ROA dan Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap FDR.

6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel FDR. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel FDR. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 ^a	.348	.264	427.40819	1.721

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset

b. Dependent Variable: Financing to Deposit Ratio

Sumber: Output SPSS 16.0 data sekunder yang diolah, 2015.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh

karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Dari tabel koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,590. Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 59%. Dari angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat.

Besarnya Adjusted R Square (R^2) adalah 0,264. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 26,4%, sedangkan sisanya 73,6% diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang dianalisis.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Variabel NPF terhadap FDR

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *Non Performing Finance* (NPF) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ramadhan⁷² dan Muna⁷³ dimana disebutkan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

⁷² Shandy bintang Ramadhan, "Analisis Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit perbankan" (Skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2013)

⁷³ Neil Al Muna, "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia" (Skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prayudi.⁷⁴ Yang menyebutkan bahwa *Non Performing Loan* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Kemudian penelitian Utari.⁷⁵ Yang menyebutkan bahwa *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian Setianingsih⁷⁶ juga menyebutkan bahwa *Non Performing Finance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). serta penelitian Nandadipa⁷⁷ dimana *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Hasil ini membuktikan bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode penelitian ini dalam kondisi yang sedikit mengkhawatirkan. Dimana terjadi penyimpangan utama dalam tingkat pengembalian atas pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia.

Dan dilihat dari tingkat rasio NPF yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dalam dal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung

⁷⁴ Arditya Prayudi, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA, NIM, terhadap LDR. vol.17. No 2

⁷⁵ Mita Puji Utari, "Analisis pengaruh CAR, NPF, ROA, dan BOPO terhadap FDR" (Skripsi: S1 UIN Sunan Kalijaga, 2011)

⁷⁶ Kristiana Setianingsih, "Pengaruh CAR, NPF, dan ROA terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia" (Skripsi : S1 UIN Sunan Kalijaga, 2012)

⁷⁷ Seandy nandadipa, "Analisis pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate terhadap FDR" (Skripsi : 2010)

rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi pada periode penelitian ini tidak diprediksi sebelumnya.

Tetapi dalam hal ini pengaruh NPF yang signifikan membuktikan dari tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari segi likuiditas membuat kepercayaan nasabah tetap terjaga dengan baik sehingga fungsi BPRS dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian perbankan mampu membantu terciptanya perekonomian suatu Negara.

2. Pengaruh Variabel CAR terhadap FDR

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Prayudi⁷⁸, Utari⁷⁹ dan Ramadhan⁸⁰ dimana disebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh setianingsih⁸¹ yang menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kemudian penelitian Nandadipa⁸² yang menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Loan to*

⁷⁸ Arditya Prayudi, "Pengaruh capital Adequacy Ratio...", 2011.

⁷⁹ Mita Puji Utari, "Analisis pengaruh CAR, NPF, ROA, dan BOPO...", 2011.

⁸⁰ Shandy bintang Ramadhan, "Analisis Faktor yang mempengaruhi...", 2013.

⁸¹ Kristiana Setianingsih, "Pengaruh CAR, NPF, dan ROA...", 2012.

⁸² Seandy nandadipa, "Analisis pengaruh CAR, NPL, Inflasi...", 2010.

Deposit Ratio (LDR). Serta penelitian yang dilakukan oleh Pratama⁸³ yang menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memberikan pengaruh yang signifikan, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas BPRS tersebut, sehingga struktur modal bank semakin kuat. Semakin kuatnya struktur modal yang dimiliki oleh BPRS, maka BPRS akan dapat menjaga likuiditasnya dengan baik.⁸⁴ Pehitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dimaksudkan dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besar didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjaminan atau sifat barang jaminan.⁸⁵

Rasio kecukupan modal minimum yang harus ada pada setiap bank sebagai pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian usaha bank, merupakan pembagian dari modal dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit adalah 8%. Hal ini didasarkan

⁸³ Billy Arma Pratama, "*Analisis Faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran Kredit Perbankan*" (Skripsi : S1 Universitas Diponegoro, 2010)

⁸⁴ Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi IV*, (Jakarta: FEUI, 2004). Hal 249

⁸⁵ *Ibid.*, Hal 252

pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar tingkat kesehatan bank untuk permodalan. Bank yang memiliki CAR yang tinggi maka Pembiayaannya juga banyak, sehingga apabila CAR meningkat maka akan meningkatkan FDR.

3. Pengaruh Variabel ROA terhadap FDR

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *Return on Asset* (ROA) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian didukung dengan penelitian Muna⁸⁶ dan Arditya Prayudi⁸⁷, dimana disebutkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) .

Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari⁸⁸ yang menyebutkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Serta penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih yang menyebutkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Perbankan. Dan penelitian Ramadhan yang menyebutkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Pengaruh variabel ROA negatif dan signifikan terhadap FDR. Semakin besar ROA maka akan menurunkan FDR atau likuiditas pada BPRS. *Return on Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata

⁸⁶ Neil Al Muna, "*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi...*", 2013.

⁸⁷ Arditya Prayudi, "*Pengaruh capital Adequacy Ratio...*", 2011.

⁸⁸ Mita Puji Utari, "*Analisis pengaruh CAR, NPF, ROA, dan BOPO...*", 2011.

total asset dalam satu periode. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tidak banyak memberikan kontribusi laba karena pada tahun tersebut terdapat *gap* yang tinggi antara bank-bank yang beroperasi pada saat itu dalam mengucurkan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa laba sebelum pajak meningkat dibanding dengan total asset yang akan mempengaruhi total pembiayaan karena total dana pihak ketiga yang turun dan tidak disalurkan secara optimal yang berakibat pada menurunnya likuiditas. Menurut data, ROA yang relatif kecil membuat likuiditas menurun. Kecenderungan penurunan ROA membuat likuiditas juga menurun karena adanya pengaruh krisis.

4. Pengaruh Variabel Inflasi terhadap FDR

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Inflasi terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandadipa⁸⁹ yang menyebutkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam hal ini terjadi perbedaan dikarenakan dari data dalam penelitian ini ada kecenderungan kenaikan inflasi yang mengakibatkan kenaikan FDR pula, hal ini menunjukkan industri BPRS mampu menekan laju inflasi sehingga banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak BPRS tetap terjaga.

⁸⁹ Seandy nandadipa, "Analisis pengaruh CAR, NPL, Inflasi...", 2010.

Pengaruh inflasi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap FDR selama periode penelitian, hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan menunjukkan peningkatan. Dengan peningkatan pembiayaan mengindikasikan bahwa pada periode penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dapat mengcover risiko yang terjadi.

Tetapi dalam hal ini pengaruh Inflasi yang positif membuktikan bahwa dari tingkat kesehatan BPRS dari segi likuiditas membuat kepercayaan nasabah tetap terjaga dengan baik sehingga fungsi BPRS dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian Perbankan mampu membantu terciptanya peningkatan perekonomian suatu Negara.

5. Pengaruh Variabel NPF, CAR, ROA, dan Inflasi terhadap FDR

Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut secara bersamaan mempengaruhi Likuiditas BPRS. Perubahan salah satu variabel tersebut, secara bersama-sama akan mempengaruhi Likuiditas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Non Performing Finance (NPF)* mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* karena semakin tinggi nilai NPF, menunjukkan semakin tinggi tingkat Likuiditas BPRS tersebut, sehingga pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah semakin besar. Hal ini dikarenakan pada periode penelitian tersebut BPRS mampu menjaga likuiditasnya dan dapat mengcover risiko pembiayaan macet tersebut dengan baik. Sehingga tingginya NPF akan mempengaruhi FDR.
2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* karena semakin tinggi nilai CAR, menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas BPRS tersebut, sehingga struktur permodalan BPRS semakin kuat. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh BPRS, maka akan terjaga likuiditasnya dengan baik. Tingginya CAR tidak akan mempengaruhi FDR karena permodalan yang kuat.
3. *Return On Asset (ROA)* mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS tidak banyak memberikan kontribusi laba karena pada periode penelitian tersebut terdapat *gap* yang tinggi diantara BPRS-BPRS yang beroperasi pada saat itu dalam

mengucurkan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa laba sebelum pajak meningkat dibanding dengan total asset yang akan mempengaruhi total pembiayaan karena total dana pihak ketiga yang turun dan tidak tersalurkan secara optimal yang berakibat pada menurunnya likuiditas.

4. Inflasi tidak mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). hal ini dikarenakan tingkat kesehatan BPRS dari segi likuiditas membuat kepercayaan nasabah tetap terjaga dengan baik sehingga fungsi BPRS dapat berjalan dengan baik. Dan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan menunjukkan bahwa BPRS dapat meminimalisir yang terjadi akibat dari dampak inflasi.
5. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut secara bersamaan mempengaruhi Likuiditas BPRS. Perubahan salah satu variabel tersebut, secara bersama-sama akan mempengaruhi Likuiditas.

B. Saran

1. Bagi Praktisi

Pihak BPRS harus lebih berani mengambil kebijakan agresif dalam pengelolaan pembiayaan. Dana yang menganggur akibat CAR yang terlalu tinggi adalah sebagai wujud kurang agresifnya ekspansi pembiayaan pada BPRS. Padahal pembiayaan sangat mendorong perkembangan sektor rill karena menjadi

kunci untuk pengentasan kemiskinan dan menuju ekonomi yang produktif serta penyedia lapangan kerja.

2. Bagi Pengembangan Teori Perbankan

Untuk menambah wawasan dan kreatifitas berfikir, serta dapat dijadikan sarana pembandingan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapannya di dunia kerja serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhi FDR khususnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini akan lebih sempurna dengan memasukkan beberapa variabel yang mendukung dalam penelitian ini, selain itu periode penelitian diperpanjang agar mampu memberikan gambaran yang lebih luas. Dan juga, akan lebih baik jika pada penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak manajemen BPRS maupun Bank ataupun stakeholders lainnya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diusung melalui penelitian ini.